

Model Komunikasi Politik Dalam Tatanan Hubungan Pemerintah Pusat Dan Daerah = Political Communication Model of The Order Central and Regional Governments Relations (Buku Komunikasi Politik Dan Budaya - "Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi dan Call For Paper 2014 :Komunikasi Politik Menuju Demokrasi Lebih Baik, Batam, 11-12 Maret 2013, diterbitkan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana dan Program Magis)

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20426865&lokasi=lokal>

Abstrak

Demokrasi sebagai sistem politik dalam praktiknya tidak bisa dipisahkan dari komunikasi. Pemerintah sebagai institusi eksekutif memiliki peranan dalam menciptakan proses demokrasi agar berjalan sesuai tatanannya. Namun, dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah yang demokratis terdapat indikasi ketidakharmonisan. Wujud ketidakharmonisan terlihat dari adanya polemik bahkan penolakan politik terhadap kebijakan publik pemerintah pusat di tingkat daerah. Selain itu dalam menyusun regulasi kedserahan serijg sekali tidak memiliki konsiderasi atau merujuk pada regulasi di tingkat pusat sehingga menciptakan kerancuan kebijakan publik. Implementasi kebijakan pusat di daerah juga total terintegrasi dalam program kerja daerah tetapi diperlakukan sebagai salah satu bentuk perlakuan proyek tahunan terhadap stakeholder yang parsial. Oleh karena itu tulisan ini mendiskusikan temuan-temuan yang diharapkan mampu menginisiasikan model komunikasi politik antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan menggunakan konsep komunikasi politik deliberatif, mediatif, komunikasi multikultur, komunikasi konsensus, dan komunikasi organisasi unggul, studi ini mengeksplorasi berbagai model dalam pendekatan kualitatif melalui diskusi kelompok terfokus dan wawancara mendalam di tiga daerah terpilih. Hasil konseptual studi ini memperlihatkan pentingnya aparatur pemerintah pusat dan daerah terlibat dalam suatu kegiatan bersama yang menggunakan model komunikasi deliberatif, mediatif, multikultural, konsensus, dan unggul. Sehingga pada saat proses hingga pengaplikasian dari kelima model ini, aparatur pemerintah pusat dan daerah dapat menjadi politisi, profesional dan relawan. Kemudian baik pemerintah pusat dan daerah dapat menempatkan aparatusnya sebagai political communication liaison officer yang mampu menjembatani kepentingan masing-masing.

<hr>

Democracy as political system in its practice was inseparable of communication. Government as executive institution had important role in creating of democracy process so that running streamlined appropriate the order. However in relation context central and local government were democracy which obtained disharmony indication. Being disharmony viewed from existence of polemics even declination of politics toward central government public policy in local level. Furthermore, in arranging regional regulation had not often consideration or refer to regulation in central level so that creating confusion of public policy. Implementation of central policy in local also unintegrated in local working program but treated one of annual treatment project to stakeholder was partial. Therefore, this paper discussed findings expected which capable initiated political communication model between central and local government. By using concept of political communication were deliberative, political mediation, multicultural communication, consensus

communication, and supreme organization communication, this study explored kind of model in qualitative method through group discussion that focused and in-depth interviewed in three selected area. Result of this study conceptual described importance apparatus of central and local government involved in joint activity that used political communication model of deliberative, mediative, multicultural, consensus, and supreme. That in the processing until application of five model, apparatus of central and regional government could be politicians, professional, and volunteers. Then both central and regional government could give position its apparatus as political communication liaison officer which capable related each of consideration.